

Tahun 2025

**Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Agam

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 Renstra 2021-2026 dan masa transisi dari Renstra 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan perencanaan Pembangunan Daerah . Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.



Lubuk Basung, 16 April 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hamdi, ST.M.Eng

Pembina Utama Muda

NIP. 197103011997031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	3
D. Landasan Hukum.....	4
E. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis	6
B. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Realisasi Anggaran	51
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

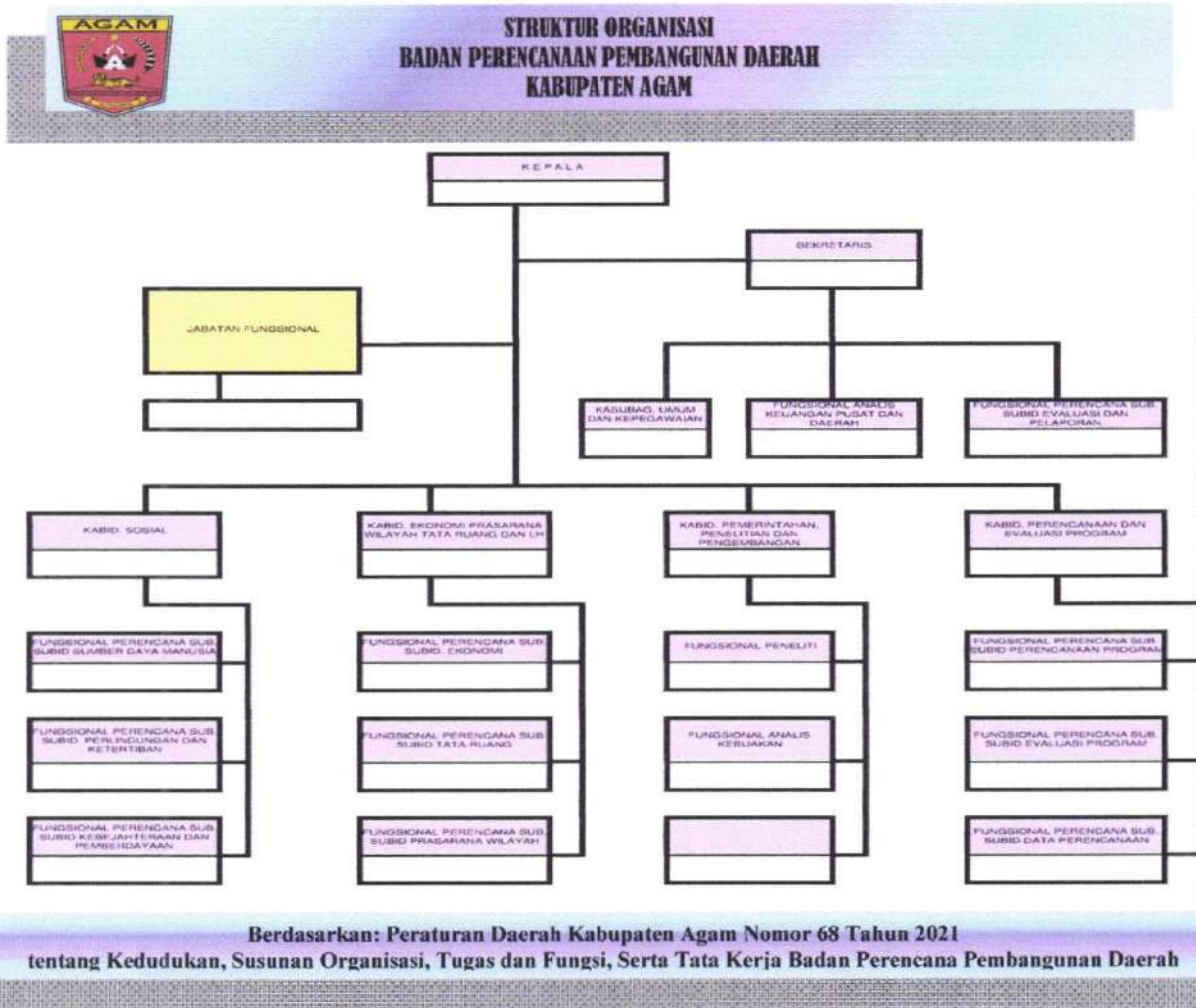
Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, susunan struktur organisasi dan tatakerja Bappeda yaitu Kepala Badan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Fungsional dan Fungsional hasil penyetaraan. Berikut bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



C. Aspek Strategis serta permasalahan utama

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode 54 sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi masih belum optimal memberikan informasi sehingga masih terdapat kekurangan kontribusi terhadap rencana

pembangunan berikutnya.

2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta pengendalian perencanaan pembangunan
4. Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan daerah untuk mendukung prioritas pembangunan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2025 periode 5, dan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 periode 1 Renstra Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Melakukan optimalisasi hasil evaluasi RKPD hingga memberikan informasi yang akurat terhadap rencana pembangunan tahun berikutnya.
2. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang terpadu, berbasis data, dan selaras dengan visi-misi kepala daerah serta kebijakan nasional.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta pengendalian perencanaan pembangunan.
4. Melakukan efisiensi anggaran hingga keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan daerah dapat mendukung prioritas pembangunan.
5. Mengoptimalkan data inovasi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih baik.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Bupati Agam No. 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Aspek Strategis serta permasalahan utama, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses yang sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan dari tahun 2025 - 2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 dan nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Agam tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Kabupaten Agam telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026 dan Tahun 2025 - 2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Kabupaten Agam yang merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Agam dengan misinya dapat mewujudkan visinya 5 tahun kedepan.

Visi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026 adalah:

Terwujudnya Kabupaten Agam Maju yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamis, dan Beradat Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani

Visi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 - 2026 adalah

Agam Madani Yang Maju, Adil Dan Sejahtera

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani.
2. Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata.
3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana.
4. Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter.
5. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 - 2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai".
2. Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

3. Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing.
4. Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.
5. Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana.
6. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam mengacu pada Misi ke-1 Tahun 2021-2026 yaitu :

**Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih,
akuntabel dan melayani.**

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam mengacu pada Misi ke-2 Tahun 2025-2029 yaitu :

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Agam Tahun 2025 sebanyak 2 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target						Target Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan untuk menjadi panduan bagi perencanaan pembangunan	Indeks kualitas perencanaan pembangunan (IKP)				100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	1. persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dengan sasaran jangka menengah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
		2. persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	angka	27,13	35	41	50	60	65	65	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah			83,5	84,5	85,5	86,5	86,5	
2. Meningkatkan fungsi kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	Indeks kinerja kelitbangan				65	69	73	77	80	84	84
		Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	1. persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	%	100	100	100	100	100	100	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Target						Target Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			2. persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	%	30	38	45	53	61	68	68

Sumber : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Agam periode 2021-2026

Sedangkan Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten agam Tahun 2025 - 2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	Indeks kualitas perencanaan pembangunan	Indeks	100	100	100	100	100	100
			Persentase keselarasan rencana pembangunan tahunan (RKPD) dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD)	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,5	82,6	82,8	83,0	83,2	83,4

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase kebijakan berbasis bukti	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase produk inovasi yang di manfaatkan dalam pembangunan daerah	%	35	38	40	42	44	46

Sumber : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Agam periode 2025-2029

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
 Indikator Kinerja Utama
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 mengacu pada Renstra 2021-2026

No	Tujuan/ sasaran strategis	Indikator kinerja	Sat.	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/rumus perhitungan	Sumber data	
1.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	1.1.	Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dengan sasaran jangka menengah daerah	%	Diperlukan alat untuk mengukur tingkat keselarasan sasaran pembangunan	Jumlah sasaran RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD : $\text{Jumlah sasaran RPJMD} \times 100 \%$	IKU
		1.2	Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	%	Untuk mengukur ketepatan tahapan perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang dilakukan : Jumlah tahapan perencanaan sesuai ketentuan $X 100 \%$	IKU
					Untuk mengukur ketepatan waktu tahapan perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang dilakukan tepat waktu : jumlah tahapan perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan $X 100 \%$	IKU
				Untuk menghitung peserta/ stakeholder yang hadir	Jumlah unsur peserta/ stakeholder yang hadir : Jumlah unsur peserta/ stakeholder sesuai ketentuan	IKU	

No	Tujuan/sasaran strategis	Indikator kinerja	Sat.	Penjelasan			
				Alasan	Formulasi/rumus perhitungan	Sumber data	
	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	1.1	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	Nilai	Menghitung Nilai Sakip	Penghitungan nilai Sakip berdasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan inspektorat setiap tahunnya.	IKU
	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	2.1	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	%	Untuk menghitung hasil kelitbangan	Jumlah hasil penelitian dan pengkajian yang dimanfaatkan : Jumlah penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan X 100 %	IKU
		2.1	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	%	Untuk menghitung unit kerja yang memiliki inovasi	Jumlah unit kerja yang memiliki inovasi : jumlah perangkat daerah seluruhnya X 100 %	IKU

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 mengacu pada Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ sasaran strategis	Indikator kinerja		Sat.	Penjelasan		
					Alasan	Formulasi/rumus perhitungan	Sumber data
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	1.1.	Persentase keselarasan rencana pembangunan tahunan (RKPD) dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD	%	Diperlukan alat untuk mengukur tingkat keselarasan sasaran pembangunan	Jumlah program di RKPD : Jumlah program RpenPJMD x 100 %	IKU
		1.2	Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	%	Untuk mengukur ketepatan tahapan perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang dilakukan : Jumlah tahapan perencanaan sesuai ketentuan X 100 %	IKU
					Untuk mengukur ketepatan waktu tahapan perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang dilakukan tepat waktu : jumlah tahapan perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan X 100 %	IKU
					Untuk menghitung peserta/ stakeholder yang hadir	Jumlah unsur peserta/ stakeholder yang hadir : Jumlah unsur peserta/ stakeholder sesuai ketentuan	IKU
	Meningkatnya tata kelola	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Menghitung Nilai Sakip	Penghitungan nilai Sakip berdasarkan pada hasil	IKU

No	Tujuan/ sasaran strategis	Indikator kinerja		Sat.	Penjelasan		
					Alasan	Formulasi/rumus perhitungan	Sumber data
	organisasi perangkat daerah					penilaian yang dilakukan inspektorat setiap tahunnya.	
	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan	2.1	Persentase kebijakan berbasis bukti	%	Untuk menghitung hasil kelitbangan	Jumlah penelitian yang di manfaatkan untuk penyusunan kebijakan : Jumlah penelitian yang dilaksanakan X 100 %	IKU
		2.1	Persentase produk inovasi yang di manfaatkan dalam pembangunan daerah	%	Untuk menghitung unit kerja yang memiliki inovasi	Jumlah produk inovasi yang di implementasikan : jumlah inovasi yang di tetapkan X 100 %	IKU

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Sat.	Target
1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan untuk menjadi panduan bagi perencanaan pembangunan	1 Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	1.1 Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dengan sasaran jangka menengah daerah	%	100
			1.2 Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	%	100
		2 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	2.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,5
2	Meningkatkan fungsi kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	1 Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	1.1 Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	%	100
			1.2 Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	%	61

Sumber : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 berdasarkan Resntra 2021-2026

**Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Sat.	Target	
1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan untuk menjadi panduan bagi perencanaan pembangunan	1 Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	1.1	Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dengan sasaran jangka menengah daerah	%	100
			1.2	Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	%	100
		2 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	2.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,5
2	Meningkatkan fungsi kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	1 Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	1.1	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	%	100
			1.2	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	%	61

Sumber : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 berdasarkan Resntra 2021-2026

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana

yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Sat.	Target
1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan untuk menjadi panduan bagi perencanaan pembangunan	1 Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	1.1 Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dengan sasaran jangka menengah daerah	%	100
			1.2 Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	%	100
		2 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	2.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,5
2	Meningkatkan fungsi kelitbangan dalam perumusan kebijakan daerah	1 Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	1.1 Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	%	100
			1.2 Persentase unit kerja yang	%	61

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Sat.	Target
			memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)		

Sumber :

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Agam Tahun 2025

No	Prog/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Anggaran
	Jumlah Anggaran				5.494.240.625
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	95	%	4.006.613.925
1	Kegiatan ADM Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	95	%	3.037.968.140
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30	orang	2.992.968.140
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran SKPD	14	Laporan	45.000.000

No	Prog/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Anggaran
2	Kegiatan Administrasi umum Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	90	%	423.989.685
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	paket	9.551.513
b	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	80.540.572
c	Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	22.025.000
d	Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	311.872.600
3	Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan barang milik daerah sesuai perencanaan	95	%	50.036.500
a	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	11	Unit	42.036.500
b	Sub Kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan	1	unit	8.000.000
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95	%	418.319.600
a	Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	38	laporan	52.965.600
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11	laporan	365.354.000
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	95	%	76.300.000

No	Prog/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Anggaran
a	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	Unit	53.480.000
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	48	Unit	22.820.000
II	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	31.605.000
6	Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang di evaluasi	100	%	31.605.000
	Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4	Laporan	31.605.000
III	Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan OPD dengan Dokumen Perencanaan daerah (Renstra, Renja)	100	%	232.663.800
7	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah	100	%	140.848.800
	Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya	11	dok	140.848.800

No	Prog/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Anggaran
		(RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
9	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen Perencanaan OPD bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen daerah	100	%	91.815.000
	<i>Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	3	<i>dok</i>	91.815.000
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan Untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja	100	%	1.223.357.900
10	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	3	Laporan	1.127.342.400
	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum</i>	<i>Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum</i>	3	<i>Laporan</i>	99.038.100
	Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan / atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan yg di terbitkan	6	Rekomendasi	1.028.304.300
11	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase OPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	100	%	96.015.500
	<i>Sub Kegiatan</i>	<i>Jumlah laporan hasil</i>	2	<i>laporan</i>	96.015.500

No	Prog/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif		

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan November tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan telah selesai penyusunan RPJMD 2025-2029 dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025-2029 perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan progam, kegiatan dan alokasi anggaran) dan dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Sat.	Target
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 Meningkatkan keselarasan perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	1.1 Persentase keselarasan rencana pembangunan tahunan (RKPD) dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD)	%	100
			1.2 Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	%	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Sat.	Target
		2 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	2.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,5
		1 Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan	1.1 Persentase produk inovasi yang di manfaatkan dalam pembangunan daerah	%	35

Sumber :Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Agam Tahun 2025.

Di dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 di buat berdasarkan pada Peraturan Daerah kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Peraturan Bupati Agam No. 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Bupati No. Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam. Hingga beberapa indikator kegiatan yang di sesuaikan.

Sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada diktum ke empat nomor 1 berbunyi : Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar / focus grup. Dengan arahan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kajian penelitian Pangan tidak dilaksanakan.

Perubahan Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2025

No	Prog/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Anggaran
	Jumlah Anggaran				5.677.724.388
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	95	Persen	4.462.211.188
1	Kegiatan ADM Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pembayaran Jasa ASN Bappeda persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional Bappeda	95	Persen	3.407.659.004
a	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</i>	30	<i>orang</i>	3.35.109.004
b	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah laporan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD</i>	14	<i>Laporan</i>	53.550.000
2	Kegiatan Administrasi umum Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD	95	persen	452.583.685
a	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	1	<i>paket</i>	9.551.513
b	<i>Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	4	<i>Paket</i>	80.540.572
c	<i>Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggunaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang disediakan</i>	2	<i>Paket</i>	22.025.000
d	<i>Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12	<i>laporan</i>	340.466.600
3	Kegiatan	Persentase Pemenuhan	95	Persen	104.068.899

No	Prog/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Anggaran
	Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	barang milik daerah sesuai perencanaan			
a	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	11	unit	96.068.899
b	Sub Kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	unit	8.000.000
4	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95	Persen	418.319.600
a	Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	38	laporan	52.965.600
b	Sub Kegiatan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11	laporan	365.354.000
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	95	Persen	79.580.000
a	Sub Kegiatan Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	unit	54.730.000
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	48	unit	24.850.000
II	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	31.605.000

No	Prog/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Anggaran
6	Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan	Persentase perencanaan pembangunan daerah yang di evaluasi	100	persen	31.605.000
	<i>Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah</i>	<i>Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah</i>	4	Laporan	31.605.000
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan OPD dengan Dokumen Perencanaan daerah (Renstra, Renja)	100	persen	270.372.000
8	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah	100	persen	187.557.000
	<i>Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	11	dok	187.557.000
9	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen daerah	100	persen	82.815.000
	<i>Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	3	dok	82.815.000

No	Prog/Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja	Target		Anggaran
	<i>dan RKPD)</i>				
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Digunakan Untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja	100	Persen	913.536.200
10	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	2	laporan	832.020.900
a	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum</i>	<i>Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum</i>	2	<i>Laporan</i>	<i>95.037.800</i>
b	<i>Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan</i>	<i>Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan</i>	6	<i>Rekomen dasi</i>	<i>36.983.100</i>
11	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase OPD yang di fasilitasi dalam pengembangan Inovasi	100	Persen	81.515.300
a	<i>Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	<i>Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	2	<i>dok</i>	<i>81.515.300</i>

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Agam yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026, Renstra 2025 - 2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Agam.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerjatujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026, Renstra 2026 – 2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah

yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Agam juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam tahun 2025 Berdasarkan
Renstra 2021 - 2026

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data	
1	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	1.1	Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dengan sasaran jangka menengah daerah	100	100	100	Baik	RPJMD 2021-2026 dan RKPD 2025
		1.2	Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	100	100	100	Baik	RPJMD 2021-2026 dan RKPD 2024
2	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	2.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,5			Menunggu Reviu APIP	
	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	3.2	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	61	90	149%	Sangat Baik	Fasilitasi inovasi daerah

(Sumber : Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025)

Uraian penjelasan tabel :

Secara keseluruhan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Renstra tercapai, namun ada satu indikator kinerja yaitu nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 yang belum dapat di hitung di karenakan belum di niai APIP.

Untuk perbandingan capaian pada Renstra Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam tahun 2025 Berdasarkan
Renstra 2025 - 2029

No .	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data	
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.1	Persentase keselarasan rencana pembangunan tahunan (RKPD) dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD)	100	100	100	Baik	RPJMD 2025-2029 dan RKPD-P 2025
		1.2	Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	100	100	100	Baik	RPJMD 2025-2029 dan RKPD-P 2025
2	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	2.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,5			Menunggu Reviu APIP	
	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan	3.1	Persentase produk inovasi yang di manfaatkan dalam pembangunan daerah	35	38	109	Sangat Baik	RPJMD 2025-2029 dan RKPD-P 2025

(Sumber : Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025)

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 dan tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	1.1	Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dengan sasaran jangka menengah daerah	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
		1.2	Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah	83,5	81,60	97,72	84,5	82,40	97,6
3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	3.1	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan Persentase ketersediaan data dan informasi untuk pembangunan	100	100	100	100%	100 %	100%
		3.1	persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	45	59	131	60	89,39	149

Uraian penjelasan tabel :

Jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja Tahun 2024 telah di capai kemajuan yang sangat signifikan dimana di tahun 2024 ada target kinerja yaitu unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja) mengalami peningkatan di sebabkan ooleh komitmen pimpinan, pendampingan dan koordinasi yang baik dengan OPD yang memiliki inovasi Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025

dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Agam target akhir tahun ke - 5 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target akhir tahun ke-5	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	1.1	Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dengan sasaran jangka menengah daerah	100	100	100
		1.2	Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	100	100	100
2	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	2.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86,5	
3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	3.1	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	100	100	100
		3.2	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	89,39	68	149
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	1.1	Persentase keselarasan rencana pembangunan tahunan (RKPD) dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD)	100	100	100
		1.2	Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	100	100	100
2	Meningkatnya tata	2.1	Nilai SAKIP Perangkat		83,2	

	kelola organisasi perangkat daerah		Daerah			
3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	3.1	Persentase kebijakan berbasis bukti		100	
		3.2	Persentase produk inovasi yang di manfaatkan dalam pembangunan daerah	38	44	86

Uraian penjelasan tabel :

Seiring dengan capaian indikator Tahun 2025 dibanding dengan target di akhir tahun rencana sesuai perencanaan strategis Tahun 2021-2026 dan sasaran strategis 2025-2029 secara keseluruhan sudah sesuai dengan target yang direncanakan. Dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran ada 1 sasaran yang tidak mencapai target. Berdasarkan hasil penilaian dari APIP Kabupaten Agam, penilaian ini belum di laksanakan.

Sedangkan 3 sasaran yang di rencanakan di tahun ini semua tercapai dan 1 sasaran melebihi target kinerja sesuai dengan target akhir tahun ke-5 Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam.

Salah satu sasaran yang melebihi target capaian kinerja yaitu persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, Puskesmas sebanyak 66 unit kerja) sebanyak 339 inovasi dipengaruhi oleh faktor gerakan satu perangkat daerah 2 inovasi yang tercantum dalam Perbub No 74 Tahun 2019 tentang Gerakan Perangkat Daerah 2 Inovasi.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan	1.1	Persentase keselarasan rencana pembangunan tahunan (RKPD) dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD)	100	-	100

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
	NSPK	1.2	Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	100	-	100
2	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	2.1	Nilai SAKIP perangkat daerah		-	
3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	3.1	Persentase produk inovasi yang di manfaatkan dalam pembangunan daerah	38	-	100

Uraian penjelasan tabel :

Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran Bappeda terhadap standar nasional dan provinsi, tidak ada data indikator kinerja yang dapat dibandingkan karena, setiap lembaga perencanaan baik di Provinsi dan Nasional mempunyai indikator kinerja yang berbeda sesuai dengan visi dan misi pada dokumen perencanaan 1 tahunan masing-masing.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan	
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	1.1	Persentase keselarasan rencana pembangunan tahunan (RKPD) dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD)	100	100	100	Upaya pengawalan dan ketentuan regulasi yang mengharuskan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	
		1.2	Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	100	100	100	Upaya pengawalan penetapan dokumen tahunan daerah telah sesuai dengan tahapan proses perencanaan	
2	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	2.1	Nilai SAKIP perangkat daerah	82,5		Belum di nilai APIP		
3	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	3.1	Persentase kebijakan berdasarkan bukti			Sesuai dengan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan	Penelitian tentang ketahanan pangan sudah di anggaran pada tahun 2026	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						<p>Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada diktum ke empat nomor 1 berbunyi : Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar / focus grup. Dengan arahan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kajian penelitian Pangan tidak</p>	

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan	
						dilaksanakan.		
		1.1	Persentase produk inovasi yang di manfaatkan dalam pembangunan daerah	35	38	108	Memfasilitasi dan pendampingan inovasi perangkat daerah dan memberikan penghargaan kepada perangkat daerah yang inovatif	

Uraian penjelasan tabel :

Dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran, telah mencapai target kinerja yang diharapkan yaitu :

1. Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dengan sasaran jangka menengah daerah dengan target 100% dan capaian 100 % hal ini dicapai karena upaya pengawalan terhadap proses penyusunan perencanaan dan ketentuan regulasi yang mengharuskan adanya keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan.
2. Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan target 100% dan capaian 100 % Upaya pengawalan penetapan dokumen tahunan daerah telah sesuai dengan tahapan proses perencanaan dengan mematuhi kalender perencanaan yang telah disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku.
3. Nilai SAKIP daerah tahun 2024, dengan target nilai 82,5 dan belum di nilai APIP.
4. Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan tidak di laksanakan dan tidak di cantumkan pada perjanjian kinerja berdasarkan Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada diktum ke empat nomor 1 berbunyi : Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar / focus grup. Dengan arahan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kajian penelitian Pangan tidak dilaksanakan.
5. Persentase produk inovasi yang di manfaatkan dalam pembangunan daerah dengan target 35 % dan realisasi 38 %. Capaian ini adalah hasil fasilitasi inovasi dari perangkat daerah.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja 2025 :

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator sasaran	% Capaian	Prog/Keg/ Sub Keg	% Capaian	Indikator Kinerja	Menunjang / Tidak Menunjang
I	Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK	Persentase keselarasan rencana pembangunan tahunan (RKPD) dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD)	100	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Menunjang
		Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	100	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah	Menunjang
				Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/kota	100	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kab/kota yang di tetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Menunjang
				Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan	100	Persentase terevaluasinya perencanaan pembangunan daerah	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator sasaran	% Capaian	Prog/Keg/ Sub Keg	% Capaian	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
				pembangunan			
				Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan	100	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Menunjang
				Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan OPD dengan Dokumen Perencanaan daerah (Renstra, Renja	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator sasaran	% Capaian	Prog/Keg/ Sub Keg	% Capaian	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Menunjang
	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Belum di nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	99,14	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	Menunjang
				Kegiatan ADM Keuangan Perangkat Daerah	100	Persentase Pemenuhan Pembayaran Jasa ASN Bappeda persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional Bappeda	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Menunjang
				Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan	100	Jumlah laporan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan laporan	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator sasaran	% Capaian	Prog/Keg/ Sub Keg	% Capaian	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	
				Kegiatan Administrasi umum Perangkat daerah	100	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Menunjang
				Sub Kegiatan barang cetakan dan penggandaan	100	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Menunjang
				Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah	90,91	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator sasaran	% Capaian	Prog/Keg/ Sub Keg	% Capaian	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penunjang Urusan Pemerintahan		<i>operasional Bappeda</i>	
				Pengadaan Peralatan mesin lainnya	100	<i>Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan</i>	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	100	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Menunjang
				Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda	Menunjang
				Sub Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Menunjang
				Sub Kegiatan Jasa Pelayanan umum kantor	100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda	Menunjang
				Sub Kegiatan	100	Jumlah kendaraan	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator sasaran	% Capaian	Prog/Keg/ Sub Keg	% Capaian	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	Menunjang
				Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Menunjang
	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase produk inovasi yang di manfaatkan dalam pembangunan daerah	38	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	Persentasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Digunakan Untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja	Menunjang

No	Tujuan / Sasaran	Indikator sasaran	% Capaian	Prog/Keg/ Sub Keg	% Capaian	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan	100	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	100	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	Menunjang
				Sub Kegiatan Perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan Baru dan / atau evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	100	Jumlah Rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan yang di tetapkan	Menunjang
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100	Persentase terfasilitasinya pengembangan Inovasi OPD	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator sasaran	% Capaian	Prog/Keg/ Sub Keg	% Capaian	Indikator Kinerja	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Sub Kegiatan Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang tehnologi dan inovasi	100	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang tehnologi dan inovasi	menunjang

Uraian penjelasan tabel 3.7: Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan dan dengan realisasi capaian yang menunjang indikator kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja 2025 :

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Kegiatan Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan dan Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan serta Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan tingkat capaian 100% sangat signifikan menunjang capaian sasaran 1 yaitu Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK dengan capaian 100 %.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan ADM Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi umum Perangkat daerah, Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan tingkat capaian 99,14 % dengan terakomodirnya kebutuhan kantor dan pembayaran gaji/tunjangan pegawai, hingga sangat signifikan menunjang sasaran OPD secara keseluruhan.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan tingkat capaian sebesar 100 % sangat menunjang sasaran OPD yang ke 2 Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang mencapai 100%.
4. Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian 100 % sangat menunjang sasaran OPD yang ke 1 yaitu Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dengan NSPK dengan capaian 100 %.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
				Fisik	Keuangan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.462.211.188	4.173.991.071	99,14	93,54
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.407.659.004	3.244.927.968	100,00	92,22
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.354.109.004	3.193.647.968	100,00	95,22
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ Semesteran SKPD	53.550.000	51.280.000	100,00	95,76
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	452.583.685	432.728.952	100,00	95,61
3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.551.513	7.628.680	100,00	79,87
4	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.540.572	76.318.911	100,00	94,76
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.025.000	20.249.639	100,00	91,94
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.466.600	328.531.722	100,00	96,49
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	104.068.899	88.134.999	95,69	84,69

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
				Fisik	Keuangan
	Pemerintah Daerah				
7	Sub kegiatan pengadaan peralatan mesin lainnya	96.068.899	80.364.999	81,82	83,65
8	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	7.770.000	100,00	97,13
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.319.600	343.418.332	100,00	82,09
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.965.600	26.521.322	100,00	50,07
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	365.354.000	316.897.000	100,00	86,74
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.580.000	64.780.820	100,00	81,40
11	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.730.000	47.250.820	100,00	86,33
12	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.850.000	17.530.000	100,00	70,54
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	31.605.000	21.597.800	100	68,34
6	Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	31.605.000	30.819.941	100	68,34
13	Sub kegiatan Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan	31.605.000	21.597.800	100	68,34

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
				Fisik	Keuangan
	pembangunan				
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	270.372.000	209.558.900	100	77,51
7	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	187.557.000	131.057.200	100	69,88
14	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	187.557.000	131.057.200	100	69,88
8	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	82.815.000	78.501.700	100,00	94,79
15	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.815.000	78.501.700	100,00	94,79
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	913.536.200	799.775.211	100,00	87,55
9	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	832.020.900	743.15.711	100,00	89,32
16	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	95.037.800	82.148.950	100,00	86,44
	Sub kegiatan Perumusan Rekomendasi atas rencana Penetapan	736.983.100	661.005.761	100,00	89,69

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
				Fisik	Keuangan
	Peraturan Baru dan / atau evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan				
12	Kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi	81.515.300	56.620.500	100,00	69,46
	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi	81.515.300	56.620.500	100,00	69,46
	Jumlah	5.677.724.388	5.204.922.982	99,78	91,67

(Sumber : Laporan e.60 Bappeda 2025)

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan rencana pembangunan tahunan (RKPD) dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD)	100	100	100	1.038.960.100	892.162.461	80,67	Tercapai
		Persentase ketepatan proses tahapan penyusunan perencanaan yang dilaksanakan	100	100	100				
	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	82,5			4.462.211.188	4.173.991.071	93,54	Menunggu reuiu APIP

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Capaian
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase produk inovasi yang di manfaatkan dalam pembangunan daerah	35	38	100	176.553.100	138.769.450	78,95	Tercapai

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 2025

Uraian penjelasan tabel 3.9:

Dilihat pada tabel perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran diatas, tergambar bahwa terdapat capaian realisasi kegiatan yang tetap tinggi. Kinerja organisasi tetap tercapai meskipun serapan dana tidak 100 %.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Indikator Kinerja				Anggaran		% Capaian		Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik	Keuangan		
							5.677.724.388	5.204.922.982	100,42	99,78	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor dan ASN	95	Persen	95	100	4.462.211.188	4.173.991.071	100	93,54	Efisien
1	Kegiatan ADM Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pembayaran Jasa ASN Bappeda persentase Pemenuhan Kebutuhan dasar Operasional Bappeda	95	Persen	95	100	3.407.659.004	3.244.927.968	100	95,22	Efisien
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30	orang	30	100	3.354.109.004	3.193.647.968	100	95,22	Efisien

No.	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Indikator Kinerja				Anggaran		% Capaian		Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik	Keuangan		
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	14	Laporan	14	100	53.550.000	51.280.000	100	95,76	Efisien
2	Kegiatan Administrasi umum Perangkat daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda	95	persen	95	100	452.583.685	432.728.952	100	95,61	Efisien
3	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	paket	1	100	9.551.513	7.628.680	100	79,87	Efisien
4	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan	4	Paket	4	100	80.540.572	76.318.911	100	94,76	Efisien

No.	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Indikator Kinerja				Anggaran		% Capaian		Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik	Keuangan		
	<i>kantor</i>	kantor yang disediakan									
5	<i>Sub Kegiatan barang cetakan dan penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	<i>Paket</i>	2	100	22.025.000	20.29.639	100	91,94	Efisien
6	<i>Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	<i>laporan</i>	12	100	340.466.600	328.531.722	100	96,49	Efisien
3	<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda</i>	95	<i>Persen</i>	90,91	95,69	104.068.899	88.134.999	90,91	84,69	Efisien
8	<i>Pengadaan Peralatan mesin lainnya</i>	<i>Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan</i>	11	<i>unit</i>	9	81,82	96.068.899	80.364.999	81,82	83,65	Efisien
9	<i>Sub Kegiatan</i>	<i>Jumlah Unit Gedung</i>	1	<i>unit</i>	1	100	8.000.000	7.770.000	100	97,13	Efisien

No.	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Indikator Kinerja				Anggaran		% Capaian		Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik	Keuangan		
	<i>Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	<i>Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>									
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda	95	<i>Persen</i>	95	100	418.319.600	343.418.332	100	82,09	Efisien
10	<i>Sub Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	38	<i>laporan</i>	38	100	52.965.600	26.521.332	100	50,07	Efisien
11	<i>Sub Kegiatan Jasa Pelayanan umum kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	<i>laporan</i>	12	100	365.354.000	316.897.000	100	86,74	Efisien

No.	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Indikator Kinerja				Anggaran		% Capaian		Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik	Keuangan		
5	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Bappeda</i>	95	<i>Persen</i>	95	100	79.580.000	64.780.820	100	81,40	Efisien
12	<i>Sub Kegiatan Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	Jumlah kendaraan perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	<i>unit</i>	14	100	54.730.000	47.250.820	100	86,33	Efisien
13	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang di pelihara	48	<i>unit</i>	48	100	24.850.000	17.530.000	100	70,54	Efisien
II	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	100	100	31.605.000	21.597.800	100	68,34	Efisien

No.	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Indikator Kinerja				Anggaran		% Capaian		Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik	Keuangan		
6	<i>Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan</i>	Persentase terevaluasinya perencanaan pembangunan daerah	100	<i>persen</i>	100	100	31.605.000	21.597.800	100	68,34	Efisien
14	<i>Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan</i>	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4	<i>Laporan</i>	4	100	31.605.000	21.597.800	100	68,34	Efisien
III	Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan OPD dengan Dokumen Perencanaan daerah (Renstra, Renja	100	<i>persen</i>	100	100	270.372.000	209.558.900	100	77,51	Efisien
8	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang</i>	<i>Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD</i>	100	<i>persen</i>	100	100	187.557.000	131.057.200	100	69,88	Efisien

No.	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Indikator Kinerja				Anggaran		% Capaian		Tingkat Efisiensi
			Target		Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik	Keuangan	
	<i>Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan dokumen perencanaan daerah</i>									
16	<i>Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11	<i>dok</i>	11	100	187.557.000	131.057.200	100	69,88	Efisien

No.	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Indikator Kinerja				Anggaran		% Capaian		Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik	Keuangan		
9	<i>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	Persentase keselarasan dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan dokumen perencanaan daerah	100	<i>persen</i>	100	100	82.815.000	78.501.700	100	94,79	Efisien
17	<i>Sub Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	<i>dok</i>	3	100	82.815.000	78.501.700	100	94,79	Efisien

No.	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Indikator Kinerja				Anggaran		% Capaian		Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik	Keuangan		
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Digunakan Untuk Perumusan Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Kinerja	100	Persen	100	100	913.536.200	799.775.211	100	87,55	Efisien
10	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	2	Laporan	100	100	832.020.900	743.154.711	100	89,32	Efisien
18	Sub Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	2	Laporan	2	100	95.037.800	82.148.950	100	86,44	Efisien

No.	Prog/Keg/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Indikator Kinerja				Anggaran		% Capaian		Tingkat Efisiensi
			Target		Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik	Keuangan	
19	Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan yang di terbitkan	6	rekomendasi	6	100	736.983.100	661.005.761	100	89,69	
11	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase terfasilitasinya pengembangan Inovasi OPD	100	Persen	100	100	81.515.300	59.770.450	100	69,46	Efisien
20	Sub Kegiatan Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	2	Laporan	2	100	81.515.300	56.620.500	100	69,46	

Uraian penjelasan tabel 3.10 :

Secara keseluruhan pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan dapat direalisasikan dan memenuhi dukungan terhadap kinerja Bappeda Kabupaten Agam selaku unsur pelaksana penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah. Dari 4 Program yang menunjang kinerja Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Agam, 3 Program dengan capaian fisik 100 %, dan satu Program Fisik 99.14 % dengan rata-rata pencapaian sebesar 99,78 %. Sedangkan rata-rata realisasi keuangan sebesar 96,39 %.

Dari total anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 5.677.724.388,- telah direalisasikan sebesar Rp. 5.204.922.982,- atau sebesar 91,67%, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 99,78%. Hingga Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Agam dapat mengefisiensikan anggaran sebesar 9.06 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Agam Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Agam menetapkan sebanyak 1 tujuan, 3 sasaran dengan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar (100%) (kategori baik) dengan sebesar (100 %) (kategori baik)
- Tujuan 1 dengan 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja sebesar (149 %) (kategori Sangat Baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum sudah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

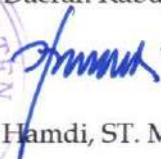
Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 5.677.724.388,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.204.922.982,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 91,67%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Agam kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Agam.

Lubuk Basung, 16 April 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Agam




Hamdi, ST. M.Eng

Pembina Utama Muda

NIP. 197103011997031005